



RENCANA STRATEGIS

DINAS PARIWISATA (DISPAR)

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan unsur otonomi daerah dibidang Pariwisata . Dinas Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi memberi pelayanan , akurat, dan terpadu pada masyarakat sesuai dengan TUPOKSI serta VISI dan MISI kepala Daerah .

Dalam rangka memenuhi tugas pokok tersebut, serta sebagai upaya menciptakan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata tahun 2021-2026, sebagai langkah awal penyusunan perencanaan Kegiatan dan pembangunan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Manna, 2021

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Selatan

Drs. YULIAN FAUZI M.AP
NIP. 19620706 198201 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN BENGKULU SELATAN	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPARIWISATA Kabupaten Bengkulu Selatan	8
2.2. Sumber Daya DPARIWISATA	13
2.3. Kinerja Pelayanan DPARIWISATA	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPARIWISATA.	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPARIWISATA	20
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3. Telaahan Renstra DPARIWISATA Kabupaten Bengkulu Selatan	23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	23
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPARIWISATA	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
5.1 Strategi dan Kebijakan DPARIWISATA	33

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	50
BAB VIII PENUTUP	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya

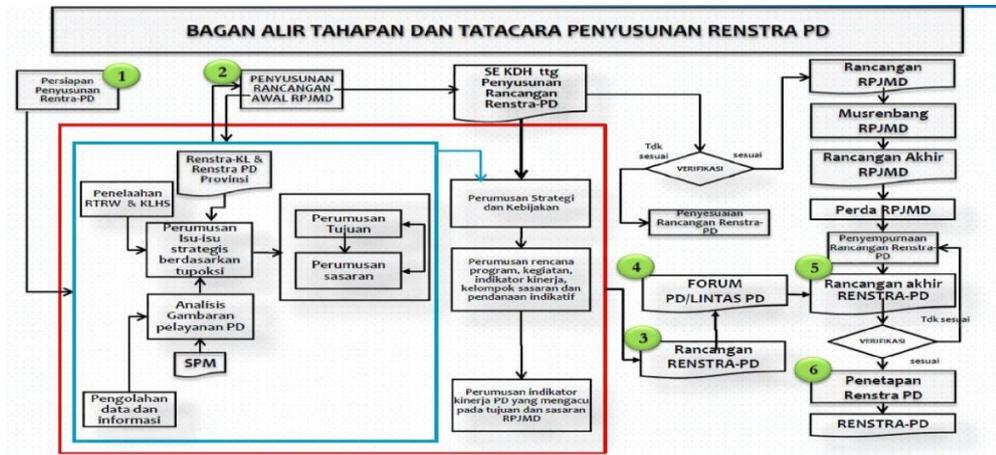
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2) yang didalamnya menyatakan bahwa:

Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Peran Dinas Pariwisata sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkansumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan daerah. Untuk itu, Dinas Pariwisata dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "*Masyarakat Indonesia Adil danMakmur*".

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Diagram 1
Diagram Alir Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan RENSTRA OPD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu serta pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun peraturan dan perundangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
32. Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 90.a Tahun 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis(RENSTRA) OPD Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan adalah dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pariwisata dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Pariwisata yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2021-2026;

5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah dinas pariwisata dalam lima tahun kedepan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan dalam Pasal 15 bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pelayanan dibidang Kepariwisataan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Bengkulu Selatan.

Pelayanan di bidang Pariwisata ditunjukkan melalui penyediaan perencanaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016, Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan unsur otonomi daerah dibidang Kepariwisataan.

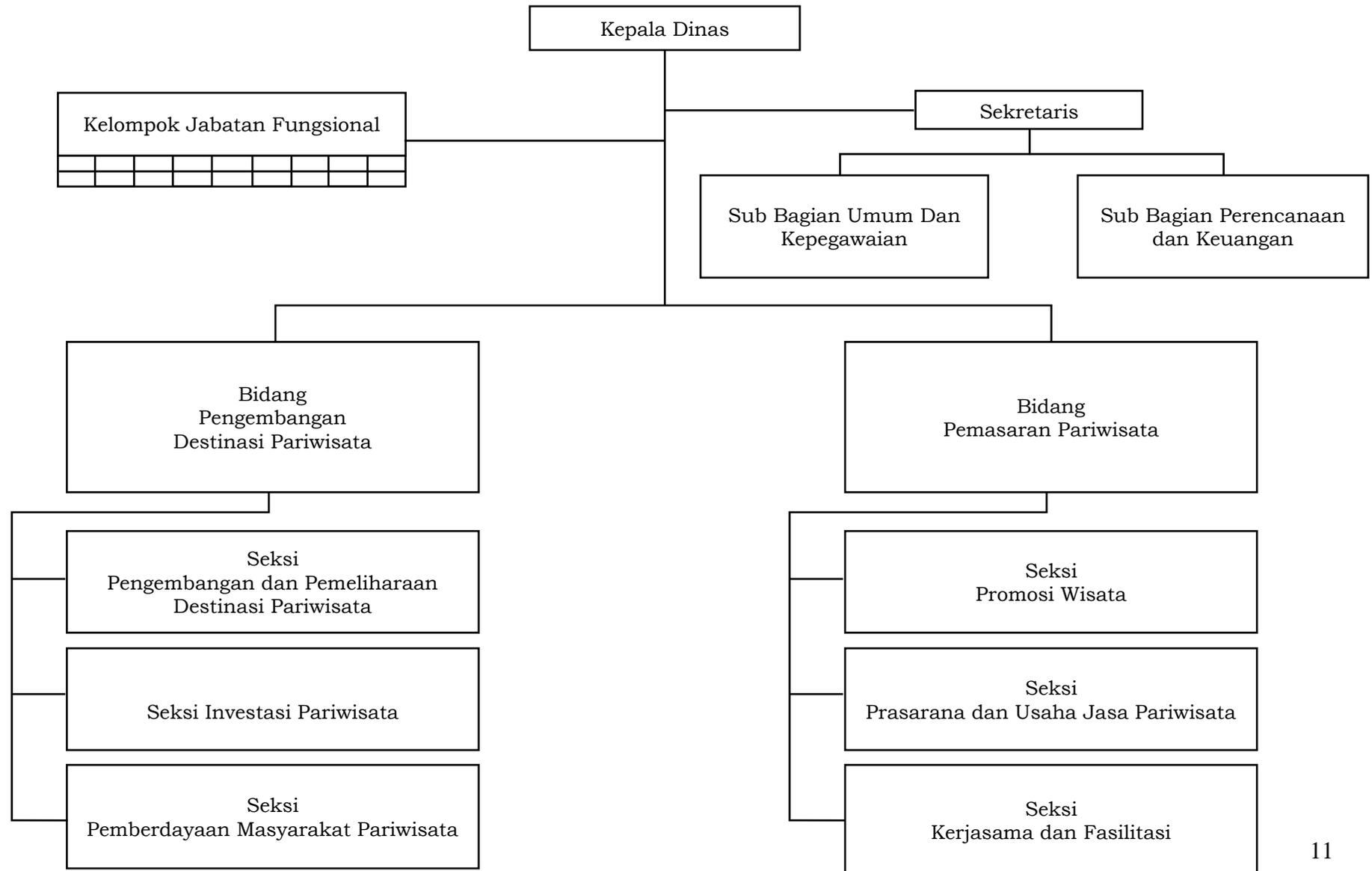
Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya adalah :

1. Perumusan program dibidang Pariwisata
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata.
3. Memberikan Izin dan pelayanan umum dibidang Pariwisata
4. Pembinaan terhadap unit teknis dinas
5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
6. Pelaksanaan Ketata usahaan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 2 sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata yang terdiri dari 3 seksi yaitu :
 - a. Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan
 - b. Kasi Investasi Pariwisata
 - c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
4. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari 3 Seksi bidang yaitu :
 - a. Kasi Pengelolaan dan Pengembangan objek wisata
 - b. Kasi Pajak dan Retribusi Pariwisata
 - c. Kasi Promosi rekreasi dan hiburan

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2	Pembina Tk I	IV/B	1
3	Pembina	IV/A	2
4	Penata Tk I	III/D	3
5	Penata	III/C	4
6	Penata Muda Tk I	III/B	3
7	Penata Muda	III/A	1
JUMLAH			15

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S 2)	2
2.	Strata 1 (S 1)	11
3.	Diploma 3 (D 3)	2
4	Diploma 1(D 1)	-
4.	SLTA / SMK	-
6	SD	-
Jumlah		15

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk klasifikasi tingkat pendidikan strata 2 (S2) berjumlah 2 orang dengan dengan persentase sebesar 13,00 persen. Pada tingkat pendidikan strata 1 (S1) menunjukkan jumlah pegawai yang paling dominan yaitu dengan jumlah 11 pegawai dengan persentase sebesar 74,00 persen dari keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk klasifikasi Diploma 3 (D3) berjumlah 2 orang dengan jumlah persentase 13,00 persen dan. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 2.2 di bawah ini:

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan

Capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan tahun 2020 ditunjukkan melalui Jumlah Kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berperan serta memelihara kebudayaan dan tempat-tempat wisata dalam kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Meningkatnya Jumlah obyek wisata yang bisa menjadi alternatif kunjungan wisata bagi wisatawan.
3. Lancarnya Informasi - informasi masalah pariwisata melalui peran serta seluruh elmen yang ada di Bengkulu Selatan.

Namun peningkatan kualitas proses pelayanan tersebut, belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kualitas dan kapasitas SDM Dinas Pariwisata
2. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi untuk mempromosikan obyek pariwisata yang ada di Bengkulu Selatan
3. Belum dilaksanakan sepenuhnya prosedur standar operasional pelayanan di bidang pariwisata
4. Terbatasnya Anggaran yang diberikan untuk merialisasikan suatu kegiatan dalam Dinas Pariwisata;
5. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodir

dalam melakukan suatu kegiatan;

6. Kurang lengkapnya data dasar OPD sebagai acuan pedoman pelaksanaan kegiatan.
7. Terbatasnya fasilitas yang ada pada dinas Pariwisata sehingga kurang terdukungnya pelayanan yang maksimal;

Table.T-C 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikatorpr Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Sektor Parawisata			Persentase Peningkatan kunjungan Wisatawan	-	-	-							n/a	-	-	-	-	-
1.1	Sasaran : Meningkatnya Kunjungan jumlah Wisatawan			Persentase Peningkatan kunjungan Wisatawan	-	-	7	8	9			6,9	7,8	n/a	-	-	-	-	-
1.2	Sasaran : Meningkatnya industri Parawisata			<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata lama tinggal wisatawan • Tingkat Hunian Hotel • Persentase peningkatan industri parawisata 	-	-	1,6	1,7	1,8			1,5	1,7	n/a	-	-	-	-	-
							48	49	50			4,7	49						
							4,8	4,9	5%			4,8	4,9						

Table. T-C 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke – (000)					Realisasi Anggaran Tahun (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata - rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran																-	-
Belanja bahan pakai habis	83.932.500	93.311.550	n/a	n/a	n/a	58.124.200	90.283.400	n/a	n/a	n/a	69.251.124.415	96.754.840.09	n/a	n/a	n/a		
Belanja bahan/material	91.450.000	55.510.000	n/a	n/a	n/a	28.650.000	55.510.000	n/a	n/a	n/a	31.328.594.86	100	n/a	n/a	n/a		
Belanja jasa kantor	69.988.000	115.340.108	n/a	n/a	n/a	59.100.257	105.553.893	n/a	n/a	n/a	84.443.414.585	91.515.340.873	n/a	n/a	n/a		
Belanja perawatan kendaraan bermotor	117.000.000	81.466.000	n/a	n/a	n/a	109.163.000	58.186.200	n/a	n/a	n/a	93.301.709.401	71.423.906.905	n/a	n/a	n/a		
Belanja sewa rumah/gedung/gedung/parkir	4.850.000	11.700.000	n/a	n/a	n/a	3.850.000	11.700.000	n/a	n/a	n/a	79.381.443.298	100	n/a	n/a	n/a		
Belanja sewa sarana mobilitas	2.500.000	28.800.000	n/a	n/a	n/a	0	28.800.000	n/a	n/a	n/a	0	100	n/a	n/a	n/a		
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	19.600.000	17.654.000	n/a	n/a	n/a	4.600.000	17.654.000	n/a	n/a	n/a	23.469.387.755	100	n/a	n/a	n/a		
Belanja perjalanan dinas	444.706.600	283.703.042	n/a	n/a	n/a	353.290.600	279.423.649	n/a	n/a	n/a	79.443525.236	98.491.594.249	n/a	n/a	n/a		
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	0	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a		
Belanja pemeliharaan	20.550.100	142.620.000	n/a	n/a	n/a	20.550.100	142.497.000	n/a	n/a	n/a	100	99.913.756.836	n/a	n/a	n/a		
Belanja jasa konsultasi	150.000.000	150.000.000	n/a	n/a	n/a	150.000.000	150.000.000	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a		
Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	n/a	16.246.000	n/a	n/a	n/a	n/a	16.246.000	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a		
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	n/a	4.500.000	n/a	n/a	n/a	n/a	5.500.000	n/a	n/a	n/a	n/a	122.222.222	n/a	n/a	n/a		
Belanja jasa tenaga ahli/struktur/narasumber	9.600.000	13.900.000	n/a	n/a	n/a	9.600.000	13.500.000	n/a	n/a	n/a	100	97.122.302.150	n/a	n/a	n/a		
Peny. Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	n/a	n/a	34.992.000	30.600.000	n/a	n/a	n/a	29.981.468	28.634.454	n/a	n/a	n/a	85.680.921.353	93.576.647.058	n/a		

Peny. Jasa Administrasi Keuangan/ Honorarium	383,125,000	n/a	101,400,000	100.200.000	n/a	295,814,000	n/a	94,200,000	100.200.000	n/a	77.210.831.973	n/a	92.899.408.284	100	n/a		
Peny. Jasa Kebersihan Kantor	4,035,000	n/a	10,194,600	18.886.000	n/a	4,035,000	n/a	10,194,600	18.886.000	n/a	100	n/a	100	100	n/a		
Peny. Alat Tulis Kantor	70,231,500	n/a	22,749,400	21.520.000	n/a	45,779,200	n/a	22,749,400	21.520.000	n/a	65.183.328.670.1	n/a	100	100	n/a		
Peny. Barang Cetak dan Penggandaan	89,398,600	65.071.300	9,632,250	7.590.000	n/a	71,422,600	65.071.300	9,632,250	7.590.000	n/a	79.892.302.564	100	100	100	n/a		
Peny. Komponen Instalasi Listrik/penerangan	5,310,000	n/a	2,677,800	3.742.800	n/a	5,310,000	n/a	2,677,800	3.742.800	n/a	100	n/a	100	100	n/a		
Peny. Bahan bacaan dan Perundang-undangan	17,400,000	n/a	32,452,000	36.370.000	n/a	12,400,000	n/a	32,354,000	36.360.000	n/a	71.264367.816	n/a	99.698.015.531	99.972.504.811	n/a		
Peny. Makanan dan Minuman	91,436,500	107.186.000	15,839,000	18.315.000	n/a	26,156,500	107.186.000	15,839,000	18.315.000	n/a	28.606.191.181	100	100	100	n/a		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	444,706,600	n/a	287,405,197	118.325.300	n/a	353,290,600	n/a	287,389,611	118.325.200	n/a	79.443.525.236	n/a	99.9994.576.994	99.999.915.487	n/a		
Belanja Modal																	
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat angkutan darat bermotor	68.600.000	n/a	n/a	n/a	n/a	68.600.000	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a		
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat angkut apung tak bermotor	183.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a		
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kantor	13.000.000	3.500.000	n/a	n/a	n/a	0	3.500.000	n/a	n/a	n/a	0	100	n/a	n/a	n/a		
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat rumah tangga	124.257.000	4.000.000	n/a	n/a	n/a	25.257.000	4.000.000	n/a	n/a	n/a	20.326.420.241	100	n/a	n/a	n/a		
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan komputer	67.500.000	21.500.000	n/a	n/a	n/a	28.500.000	21.500.000	n/a	n/a	n/a	42.222.222.222	100	n/a	n/a	n/a		
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat studio	36.000.000	7.500.000	n/a	n/a	n/a	0	7.500.000	n/a	n/a	n/a	0	100	n/a	n/a	n/a		
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat keamanan dan perlindungan	191.850.000	143.880.000	n/a	n/a	n/a	179.850.000	143.880.000	n/a	n/a	n/a	93.745.113.369	100	n/a	n/a	n/a		

Belanja modal gedung dan bangunan-pengadaan bangunan gedung tempat kerja	1.235.918.000	1.252.019.000	n/a	n/a	n/a	240.950.000	1.181.270.000	n/a	n/a	n/a	19.495.629.968	95.578.347.43	n/a	n/a	n/a		
Belanja modal tanah-pengadaan tanah perekebunan	n/a	150.643.000				n/a	0				0						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	n/a	n/a	102.016.000	41.404.500	n/a	n/a	n/a	101.996.000	41.404.500	n/a	n/a	n/a	99.980.395.232	100			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	n/a	n/a	12.584.670	0	n/a	n/a	n/a	12.584.670	0	n/a	n/a	n/a	100	0	n/a		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	n/a	n/a	83.000.000	67.215.000	n/a	n/a	n/a	77.198.148	65.886.770	n/a	n/a	n/a	93.009.8.168.67	98.023.908.353	n/a		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	n/a	n/a	9.430.000	4.390.000	n/a	n/a	n/a	9.430.000	4.390.000	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a		
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	n/a	n/a	283.948.000	n/a	n/a	n/a	n/a	281.397.500	n/a	n/a	n/a	n/a	99.095.432.966	n/a	n/a		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Laporan Keuangan	n/a	n/a	7.615.000	2.571.300	n/a	n/a	n/a	7.615.000	2.571.300	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran	n/a	n/a	17.111.100	41.761.900	n/a	n/a	n/a	17.111.100	41.678.200	n/a	n/a	n/a	100	99.799.578.084	n/a		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata																	
Pelatihan pemandu wisata terpadu	n/a	n/a	106.223.000	255.870.000	n/a	n/a	n/a	106.223.000	255.770.000	n/a	n/a	n/a	100	99.960.9.176.53	n/a		

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	n/a	n/a	97,000,000	50.760.000	n/a	n/a	n/a	97,000,000	50.669.000	n/a	n/a	n/a	100	99.820.724.98	n/a			
Sosialisasi Objek Pajak Daerah	n/a	n/a	40,245,000	n/a	n/a	n/a	n/a	40,018,000	n/a	n/a	n/a	n/a	99.435.954.776	n/a	n/a			
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh																		
Penyusunan Instrumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	n/a	n/a	5,804,500	n/a	n/a	n/a	n/a	5,804,500	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a			
Program Pengembangan Destinasi Wisata																		
Pengembangan objek pariwisata unggulan	n/a	n/a	n/a	119.037.000	n/a	n/a	n/a	n/a	119.037.000	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a			
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	n/a	n/a	535,525,000	n/a	n/a	n/a	n/a	523,800,000	n/a	n/a	n/a	n/a	97.810.5559.731	n/a	n/a			
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	n/a	n/a	548,114,490	17.826.000	n/a	n/a	n/a	547,854,490	17.826.000	n/a	n/a	n/a	99.952.564.654	n/a	n/a			
Peningkatan dan Pemeliharaan Keindahan dan Kenyamanan Tempat Wisata	n/a	n/a	363,873,700	104.527.000	n/a	n/a	n/a	361,532,450	104.527.000	n/a	n/a	n/a						
Pengembangan daerah objek tujuan wisata	n/a	n/a	n/a	1.775.894.000	n/a	n/a	n/a	n/a	1.752.187.105	n/a	n/a	n/a	n/a	98.665.072.633	n/a			
Program Pengembangan Kemitraan																		
Promosi Wisata Alam dan Permainan Lokal (Arung Jeram, Rali Rakit dan Goa Suruman)	n/a	n/a	293,900,000	164.786.700	n/a	n/a	n/a	293,799,000	162.913.300	n/a	n/a	n/a	99.965.634.569	98.863.136.406				

Program Perencanaan Pembangunan Daerah																		
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	n/a	n/a	3,514,400	n/a	n/a	n/a	n/a	3,514,400	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a			
Program Perencanaan Tata Ruang																		
Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang	n/a	n/a	109,310,000	n/a	n/a	n/a	n/a	97,362,813	n/a	n/a	n/a	n/a	89.070.362.272	n/a	n/a			
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota																		
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																		
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	0			
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	53.600.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a				
Administrasi keuangan perangkat daerah																		
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	115.500.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a				
Administrasi kepegawaian perangkat daerah																		
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
Administrasi umum perangkat daerah																		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	3.755.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a				

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a			
Penyediaan peralatan rumah tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	19.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a			
Penyediaan bahan logistik kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	76.540.500	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a			
Penyediaan bahan bacaan cetakan dan penggandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	7.500.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	36.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a			
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	137.437.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a			
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	63.890.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a			
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	39.999.834	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a			
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	67.705.250	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a			
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	58.132.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a			
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	8.440.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a			

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata																		
Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota																		
Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	n/a	17.500.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a				
Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota																		
Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	n/a	100.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a				
Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota																		
Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	n/a	110.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a				
Program pemasaran pariwisata																		
Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota																		
Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	n/a	n/a	n/a	n/a	125.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a				
Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.	n/a	n/a	n/a	n/a	160.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata

Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam menjaga kebersihan tempat – tempat wisata dalam kabupaten Bengkulu Selatan ;
2. Kurangnya dukungan fasilitas dan SDM dalam merialisasikan suatu kegiatan, sehingga masih kurang optimalnya hasil yang didapat.

Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada pada dinas Pariwisata melalui kucuran dana DAK dan Dekonsentrasi ;
2. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar ;
3. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat ;
4. Ketersediaan dan kesanggupan para pengelola obyek wisata untuk melestarikan dan mengembangkan obyek wisata.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 46 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan unsur otonomi daerah dibidang Pariwisata. Dinas Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi memberi pelayanan, akurat, dan terpadu pada masyarakat sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Kepala Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan, Dinas Pariwisata memberikan gambaran pelayanan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada Wisatawan Lokal, Nasional dan Mancanegara yang berkunjung ke obyek wisata di Bengkulu Selatan ;
2. Memelihara sarana dan prasarana obyek pariwisata ;
3. Meningkatkan pelayanan kepada Tourist yang berkunjung ke Bengkulu Selatan ;
4. Meningkatkan kualitas SDM pegawai Dinas Pariwisata;
5. Meningkatkan kerja sama dengan para pelaku di bidang Pariwisata (Pokdarwis dan Pengusaha penunjang Pariwisata) dan media masa baik elektronik maupun non elektronik serta media lokal, nasional dan juga internasional ;
6. Pembinaan terus menerus terhadap lembaga adat dan komunitas pelestari budaya lokal yang merupakan bagian dari penunjang Pariwisata ;
7. Memberikan bantuan kepada kelompok seni yang ada di masyarakat untuk tetap melestarikan kesenian yang juga merupakan bagian dari wisata budaya ;
8. Melakukan pengembangan desentralisasi pariwisata ke sektor yang menunjang dan mendukung pengembangan pariwisata di Bengkulu Selatan ;
9. Melakukan promosi pariwisata, baik promosi dalam skala lokal, nasional maupun internasional ;
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata dibidang pariwisata dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas Pariwisata sebagai lembaga pelaksana harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dimulai gaungnya sejak tahun 2021, telah mengantarkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memimpin Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode tahun 2021-2026, dengan visi ***“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan Cinta BS”***. Dimensi yang terkandung dalam kalimat “EMAS” yaitu mewujudkan Bengkulu Selatan yang menjadi tujuan utama kunjungan wisatawan Mancanegara, Negara dan Lokal di Provinsi Bengkulu dengan mengusung konsep SAPTA PESONA (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan Gotong royong untuk Tumbuhnya Sektor Ekonomi Usaha Rakyat Berbasis Pariwisata.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi III ***“Membangun Ekonomi Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** yaitu:

1. Daerah tujuan wisata yang memenuhi kebutuhan rekreasi, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengedepankan SAPTA PESONA di atas tadi;
2. Industri pariwisata yang berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian daerah, kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam;
3. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
4. Organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam

rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;

5. Mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang efektif, kreatif, dan inovatif
6. Membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan dan akhlak.

Program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diantaranya yaitu :

1. Melakukan revitalisasi, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik .
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan.
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, dan irigasi) di pedesaan serta pembangkit tenaga listrik .
4. Pembangunan Desa Swadaya dan Mandiri melalui Dana Alokasi Desa dan penguatan lembaga keuangan mikro pedesaan.
5. Pengembangan komoditas unggulan daerah berbasis pertanian.
6. Peningkatan peran dan perlindungan perempuan.
7. Penyusunan Rencana Tata Ruang dan mitigasi bencana.

Mengacu pada visi dan misi serta program kepala daerah terpilih tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PARIWISATA, antara lain:

Penghambat	Pendorong
1. Belum memadainya tenaga teknis pariwisata.	1. Legalitas berdasarkan Perda Nomor 46 Tahun 2016
2. Belum tersedianya data pembelajaran bidang pariwisata dengan lengkap dan akurat	2. Tersedianya SDM yang secara kuantitas mencukupi
3. Belum dipedomaninya dokumen mengenai pariwisata	3. Adanya kewenangan fungsi pariwisata dan fungsi koordinasi,
4. Kurang nya fasilitas dan sarana pendukung dalam melakukan suatu kegiatan	4. Adanya forum dan mekanisme perencanaan bidang pariwisata.
5. Kurangnya dukungan teknologi informasi	

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sinergi dengan Renstra kementerian Pariwisata RI dan Provinsi Bengkulu dimana dokumen perencanaan keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

Telaah terhadap renstra dimaksudkan untuk mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra OPD sebagai berikut :

Penghambat	Pendorong
1. Belum memadainya tenaga teknis pariwisata.	1. Legalitas berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016
2. Belum tersedianya data pembelajaran bidang pariwisata dengan lengkap dan akurat	2. Tersedianya SDM yang secara kuantitas mencukupi
3. Belum dipedomaninya dokumen mengenai pariwisata	3. Adanya kewenangan fungsi pariwisata dan fungsi koordinasi dengan stakeholder bidang pariwisata serta para pemodal bidang pariwisata
4. Kurangnya fasilitas dan sarana pendukung dalam melakukan suatu kegiatan promosi pariwisata dan usaha wisata	4. Adanya forum dan mekanisme perencanaan bidang pariwisata.
5. Kurangnya dukungan teknologi informasi yang memadai untuk mempromosikan Pariwisata	

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah wisata kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah pariwisata kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah pariwisata kabupaten memiliki fungsi :

1. Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah pariwisata kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama bidang pariwisata dalam RTRW kabupaten; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pariwisata kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan terhadap di atas, maka tujuan penataan ruang Bidang Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Bengkulu Selatan Sebagai Destinasi Pariwisata Unggul dan Berdaya Saing Yang Berbasis Alam, Budaya, Kreatifitas dan Berbudi Pekerti Serta Akhlak Mulya Dalam Mendorong Pembangunan Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”

Untuk mencapai tujuan diatas, maka kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

Kebijakan 1 :

Kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata dengan strategi sebagai berikut :

1. Perwilayahan destinasi pariwisata, meliputi :
 - a. Perencanaan pembangunan destinasi pariwisata unggulan dan kawasan strategi pariwisata, meliputi :
 - a) Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan destinasi pariwisata unggulan dan kawasan strategis pariwisata daerah
 - b) Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan destinasi pariwisata unggulan dan kawasan strategis pariwisata daerah
 - b. Penegakkan regulasi pembangunan destinasi pariwisata unggulan daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah
 - c. Pengendalian implementasi pembangunan destinasi pariwisata unggulan daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah
2. Pembangunan daya tarik wisata ;

- a. Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan koridor pariwisata daerah
 - b. Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar kepariwisataan daerah
 - c. Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar kepariwisataan daerah yang lebih luas
3. Pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata, meliputi :
- a. Pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata
 - b. Meningkatkan prasarana umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan daya saing koridor pariwisata daerah
4. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi, meliputi :
- a. Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah
 - b. Pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah
 - c. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata
5. Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :
- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan
 - b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat dibidang kepariwisataan
 - c. Penguatan usaha kesadaran masyarakat
6. Pengembangan investasi, meliputi :
- a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi dalam industri pariwisata
 - b. Meningkatkan kemudahan investasi dibidang pariwisata
 - c. Meningkatkan intensitas promosi investasi dibidang pariwisata di dalam dan di luar negeri

Kebijakan 2 :

Kebijakan dan strategi pembangunan dan pemasaran pariwisata dengan strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan pasar wisatawan, meliputi :
 - a. Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang di prioritaskan
 - b. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu
 - c. Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata
 - d. Meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain
2. Pengembangan citra pariwisata, meliputi :
 - a. Pengembangan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai destinasi pariwisata
 - b. Pengembangan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing
3. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, meliputi :
 - a. Pengembangan kemitraan yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan
 - b. Peningkatan peran media komunikasi dalam memasarkan dan mempromosikan wisata

Kebijakan 3 :

Kebijakan strategi pembangunan industri pariwisata dengan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan struktur industri pariwisata ;
2. Peningkatan daya saing produk pariwisata ;
3. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata ;
4. Penciptaan kredibilitas bisnis ;
5. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Kebijakan 4 :

Kebijakan dan strategi pembangunan kelembagaan dengan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan organisasi kepariwisataan, meliputi :
 - a. Restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di tingkat kabupaten

- b. Optimalisasi koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - c. Optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di daerah
 - d. Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat
2. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata, meliputi :
- a. Optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM pemerintah
 - b. Akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan
 - c. Standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan
 - d. Optimalisasi kuantitas SDM industri pariwisata
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, meliputi :
- a. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata
 - b. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata
 - c. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian terhadap lingkungan hidup strategis dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini penting dilakukan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan mampu menjadi pemicu perilaku partisipatif dari stakeholder pelaku pembangunan daerah.

Kajian lingkungan hidup strategis dapat menjadi dokumen yang menjamin pelaksanaan *sustainable development* di daerah, yang memuat beberapa informasi diantaranya :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup,
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dengan kajian lingkungan hidup strategis ini, maka diharapkan ke depannya perencanaan pembangunan dapat lebih berorientasi pada pembangunan berkelanjutan

dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan. Apabila pelaksanaan rencana pembangunan tidak sejalan dengan hasil KLHS maka kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan tersebut perlu diperbaiki dan ditinjau kembali.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dari analisa terhadap isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Rencana Strategi 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian pembangunan pariwisata daerah.
2. Penyediaan data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan akuntabel sehingga perencanaan pembangunan pariwisata yang komprehensif dan berkelanjutan dapat dicapai.
3. Penyusunan rencana pembangunan pariwisata wajib memperhatikan dan mempedomani dokumen – dokumen perencanaan daerah.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan pariwisata yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan secara professional dan transparan.
5. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik secara professional dalam mengembangkan kreatifitas, menalarkan ide dalam membaca konsep rencana pembangunan pariwisata yang ingin dicapai serta memformulasikan ke dalam rencana yang aplikatif.
6. Tingginya dukungan teknologi informasi yang memadai baik dari sisi infrastruktur maupun pengolahannya dalam bentuk website sebagai media informasi perencanaan pembangunan pariwisata daerah.
7. Peningkatan *kebersamaan* dalam segala hal sebagai upaya mencapai visi bersama dalam memenuhi tugas dan panggilan.
8. Kajian Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai upaya menjamin pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Pariwisata selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel T-C.25
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya daya saing perekonomian sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan 	<p>Tujuan:Persentase peningkatanPDRB Pariwisata</p> <p>Sasaran:Persentase peningkatankunjungan wisatwan</p>	9%	10%	12%	15%	17%
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya industri pariwisata 	<p>Tujuan:Persentase peningkatan PAD Pariwisata</p> <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata lama tinggal - Tingkat hunian hotel - Persentase peningkatan industri pariwisata 	1,8 50 5%	2 55 7%	2,2 60 10%	2,5 65 12%	3 70 15%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pariwisata mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

Table T-C.26

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS(Elok,Maju,Aman,dan Sejahtera)					
Misi III : Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.					
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkat nya Daya Saing Perekonomian Sektor Pariwisata	Persentase Peningkatan PDRB Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Jumlah Wisatawan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Memperbanyak sosialisasi di bidang pariwisata kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun pariwisata	1. Meningkatkan kesadaran para pelaku pariwisata terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan menciptakan kenangan kepada para wisatawan
	Persentase peningkatan PAD Pariwisata	Meningkatnya Industri Pariwisata	Rata-rata lama tinggal Wisatawan Tingkat Hunian Hotel Persentase Peningkatan Industri Pariwisata	Meningkatkan daya tarik dan fasilitas di tempat-tempat wisata Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi Memperbanyak objek wisata sebagai kunjungan alternatif bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal.	2. Peningkatan objek wisata sebagai pendapatan asli daerah. 3. Peningkatan aksesibilitas teknologi informasi 4. Melestarikan dan memperindah objek wisata yang ada di Bengkulu Selatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata, Melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah di tetapkan, maka perlu penjabaran oprasional yang lebih rinci kedalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Pariwisata meetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020-2026 yaitu sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2016

Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3.26	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3.26	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3.26	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
3.26	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.26	01	2.01	07	evaluasi kinerja perangkat daerah
3.26	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah
3.26	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
3.26	01	2.01	03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD.
3.26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
3.26	01	2.03		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
3.26	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik

					daerah SKPD
3.26	01	2.05			Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah
3.26	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
3.26	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.26	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.26	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
3.26	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.26	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.26	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.26	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.26	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan.
3.26	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu
3.26	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.26	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.26	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.26	01	2.07	05		Pengadaan Mebel
3.26	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.26	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.26	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.26	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.26	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.26	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau

					Kendaraan Dinas Jabatan
3.26	01	2.09	02		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
3.26	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya
3.26	02				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
3.26	02	2.06			Pengelolaan kawasan strategis pariwisata
3.26	02	2.02	03		pengembangan kawasan startegis pariwisata
3.26	02	2.02	04		pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata startegis
3.26	05	2.01	01		Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26	05	2.01	05		Fasilitasi proses kreasi,produksi,distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif
3.26	02	2.03			Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
3.26	02	2.03	06		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata
3.26	02	2.04			Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah
3.26	02	2.04	03		Pengelolaan investasi pariwisata
3.26	02	2.04	04		Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata
3.26	02	2.04	05		fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata
3.26	02	2.04	01		Penyediaan layanan pendaftar usaha pariwisata kabupaten/kota
3.26	03				Pemasaran pariwisata
3.26	03	2.01			Pemasaran pariwisata dalam,dan luar negeri,daya tarik,destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
3.26	03	2.01	01		Penguatan promosi melalui media cetak,elektronik,dan media lainnya baik dalam luar negeri
3.26	03	2.01	02		Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota

3.26	03	2.01	04		Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri
3.26	03	2.01	05		Monitoring dan evaluasi jasa usaha bidang pariwisata

Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, (outcome) Dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi			
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi awal pd akhir periode Renstra OPD		
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.			Tar get	Rp.	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya Daya saing Perekonomian Sektor Pariwisata	Meningkatnya jumlah wisatawan	3.26					Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota	Nilai AKIP	B	B		B		B		BB		BB		A		A		dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	01	2.01	01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah	B	B		B		B		BB		BB		A		A		dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	9 dok	9 dok	60.000.000	9 dok	60.000.000	9 dok	70.000.000	9 dok	80.000.000	9 dok	90.000.000	9 dok	100.000.000	9 dok	400.000.000	dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	01	2.01	06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Jumlah dokumen dan laporan capaian kinerja laporan triwulan	2 dok/lap	2 dok/lap	10.000.000	2 dok/lap	10.000.000	2 dok/lap	20.000.000	2 dok/lap	30.000.000	2 dok/lap	40.000.000	2 dok/lap	50.000.000	2 dok/lap	150.000.000	dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	01	2.01	07		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen	3 dok	3 dok	10.000.000	3 dok	10.000.000	3 dok	20.000.000	3 dok	30.000.000	3 dok	40.000.000	3 dok	50.000.000	3 dok	150.000.000	dispar	Kab.bengkulu selatan

*Rencana Strategis
Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan
2021-2026*

		3.26	0 1				Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota	Persentase temuan BPK/LHP inspektorat yang ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		dispar	Kab.bengkulu selatan		
								Persentase BMD dalam kondisi baik/siap pakai	80%	80%		80%		90%		100%		100%		100%		dispar	Kab.bengkulu selatan		
		3.26	0 1	2.0 2			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang sesuai SAP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		dispar	Kab.bengkulu selatan		
		3.26	0 1	2.0 2	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	16 ASN	16 ASN	1.665.37 9.216	20 ASN	1.66 5.37 9.21 6	21 ASN	1.67 0.37 9.21 6	22 ASN	1.675.37 9.216	23 ASN	1.680.37 9.216	24 ASN	1.685.37 9.216	25 ASN	18.376.8 96.080	dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 1	2.0 1	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi keuangan yang sesuai SAP	12 OB	12 OB	115.500. 000	12 OB	115. 500. 000	12 OB	116. 000. 000	12 OB	116.500. 000	12 OB	117.000. 000	12 OB	117.500. 000	12 OB	582.500. 000	dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 1	2.0 2	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir SKPD	Jumlah dokumen keuangan OPD	1 Dok	1 Dok	5.000. 000	1 Dok	5.0 00. 000	1 Dok	6.0 00. 000	1 Dok	7.000. 000	1 Dok	8.000. 000	1 Dok	9.000. 000	1 Dok	35.000. 000	dispar	Kab.bengkulu selatan

*Rencana Strategis
Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan
2021-2026*

		3.26	0 1				Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota	Persentase BMD dalam kondisi baik/siap pakai	80%	80 %		80 %		90 %		100 %		100 %		100 %		100 %		dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 1	2.0 3			Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	% BMD dalam kondisi baik/siap pakai	80%	80 %		80 %		90 %		100 %		100 %		100 %		100 %		dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 1	2.0 3	01		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah	2 lap	2 lap	5.000. 000	2 lap	5.0 00. 000	2 lap	6.0 00. 000	2 lap	7.000. 000	2 lap	8.000. 000	2 lap	9.000. 000	2 lap	35.000. 000	dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 1				Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota	Tingkat kepuasan Aparatur Sipil Negara(ASN)	80%	80 %		80 %		80 %		85 %		90 %		100 %		100 %		dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 1	2.0 5			Administrasi kepegawaian dan perangkat daerah	Tingkat kepuasan pelayanan ASN	80%	80 %		80 %		85 %		90 %		95 %		100 %		100 %		dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 2	2.0 5	02		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pegawai yang memakai pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	20 org	20 org	25.000. 000	20 org	25.0 00.0 00	20 org	30.0 00.0 00	20 org	35.000. 000	20 org	40.000. 000	20 org	45.000. 000	20 org	175.00 0.000	dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 1	2.0 5	09		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	25 org	25 org	40.000.0 00	25 org	40.0 00.0 00	25 org	45.0 00.0 00	25 org	50.000.0 00	25 org	55.000.0 00	25 org	60.000.0 00	25 org	250.000. 000	Dispar	Kab.bengkulu selatan

		3.26	01			Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota	Tingkat kepuasan aparatur sipil (ASN)	80%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%							
		3.26	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Tingkat kepuasan ASN	80%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%							
		3.26	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dalam keadaan baik	30 pcs	30 pcs	3.775.000	30 pcs	3.775.000	30 pcs	3.785.000	30 pcs	3.790.000	30 pcs	3.795.000	30 pcs	18.925.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah barang penunjang kegiatan kantor	20 jenis	20 jenis	10.000.000	20 jenis	10.000.000	20 jenis	30.000.000	20 jenis	40.000.000	20 jenis	50.000.000	20 jenis	150.000.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah komponen rumah tangga	650 buah/lusin/botol	650 buah/lusin/botol	19.000.000	650 buah/lusin/botol	19.000.000	650 buah/lusin/botol	21.000.000	650 buah/lusin/botol	22.000.000	650 buah/lusin/botol	23.000.000	650 buah/lusin/botol	105.000.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah komponen bahan logistik kantor	750 buah/rim	750 buah/rim	30.000.000	750 buah/rim	30.000.000	750 buah/rim	40.000.000	750 buah/rim	45.000.000	750 buah/rim	50.000.000	750 buah/rim	200.000.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah komponen barang cetakan dan penggandaan	13.000 lembar/pak	13.000 lembar/pak	7.500.000	13.000 lembar/pak	7.500.000	13.000 lembar/pak	8.500.000	13.000 lembar/pak	9.000.000	13.000 lembar/pak	9.500.000	13.000 lembar/pak	42.000.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan	1.000 examp	1.000	20.000.000	1.000	20.000.000	1.000	30.000.000	1.000	35.000.000	1.000	40.000.000	1.000	150.000.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan

*Rencana Strategis
Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan
2021-2026*

							peraturan-perundangan undangan di OPD	lar	exemplar		exemplar	.00	exemplar	.00	exemplar		exemplar		exemplar						
		3.26	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kue kotak, nasi kotak dan air mineral	1.750 kotak/gelas	1.750 kotak/gelas	10.000.000	1.750 kotak/gelas	10.000.000	1.750 kotak/gelas	20.000.000	1.750 kotak/gelas	30.000.000	1.750 kotak/gelas	40.000.000	1.750 kotak/gelas	50.000.000	1.750 kotak/gelas	150.000.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	100 kali/dalam dan luar daerah	100 kali/dalam dan luar daerah	132.437.000	100 kali/dalam dan luar daerah	132.437.000	100 kali/dalam dan luar daerah	133.000.000	100 kali/dalam dan luar daerah	134.000.000	100 kali/dalam dan luar daerah	135.000.000	100 kali/dalam dan luar daerah	136.000.000	100 kali/dalam dan luar daerah	670.437.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	01				Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota	Tingkat kepuasan Aparatur sipil negara (ASN)	80%	80%		80%		85%		90%		95%		100%		100%		Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	01	2.07			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80%	80%		80%		85%		90%		95%		100%		100%		Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	01	2.07	02		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan di opd	1 unit roda 4	1 unit roda 4	250.000.000	1 unit roda 4								1 unit roda 4	290.000.000	1 unit roda 4	540.000.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan

daerah																									
		3.26	0 1	2.0 9	01		Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan oprasional atau lapangan di OPD yg terawat baik	8 unit	8 unit	67.705.250	8 unit	67.705.250	8 unit	68.000	8 unit	69.000.000	8 unit	70.000.000	8 unit	71.000.000	8 unit	345.705.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 1	2.0 9	02		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin penunjang kegiatan OPD yg terawat baik	8 kali	8 kali	15.000.000	8 kali	15.000.000	8 kali	20.000	8 kali	25.000.000	8 kali	30.000.000	8 kali	35.000.000	8 kali	125.000.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 1	2.0 9	09		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung/bangunan yg di rehabilitasi	2 unit	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	6.000	2 unit	7.000.000	2 unit	8.000.000	2 unit	9.000.000	2 unit	35.000.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan

*Rencana Strategis
Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan
2021-2026*

		3.26	0 2				Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi yang dikunjungi														Dispar	Kab.bengkulu selatan		
		3.26	0 2	2.0 6			Pengelolaan kawasan strategis pariwisata															Dispar	Kab.bengkulu selatan		
		3.26	0 2	2.0 2	03		Pengembangan kawasan strategis pariwisata	Jumlah kawasan strategis pariwisata	2 kawas an	2 ka was an		2 ka was an	2 ka was an		2 ka was an		2 ka was an		2 ka was an			Dispar	Kab.bengkulu selatan		
		3.26	0 2	2.0 2	04		Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis	Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yg terpelihara sarana dan prasarana objek wisata	2 bangun an	2 ban gun an	1.00.000.000	2 ban gun an	100 .00 00	2 ban gun an	105 .00 00	2 ban gun an	106.00 0.000	2 ban gun an	107.00 0.000	2 ban gun an	108.00 0.000	2 ban gun an	526.00 0.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 5	2.0 1	01		Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah pengelolaan kawasan strategis pariwisata	4 kali	4 kali	20.000 .000	4 kali	20.000 .000	4 kali	25.000 .000	4 kali	30.000 .000	4 kali	35.000 .000	4 kali	40.000 .000	4 kali	150.00 0.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 5	2.0 1	05		Fasilitasi proses kreasi,produksi,distribusi konsumsi dan	Jumlah industri yg	67 pelaku	67 pel aku	25.000 .000	67 pel aku	25.000 .000	67 pel aku	30.000 .000	67 pel aku	35.000 .000	67 pel aku	40.000 .000	67 pel aku	45.000 .000	67 pel aku	175.00 0.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan

*Rencana Strategis
Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan
2021-2026*

		3.26	0 2	2.0 4	01		Penyediaan layanan pendaftar usaha pariwisata kabupaten/kota	Jumlah usaha pariwisata yg membuat rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	15.000.000	20 rekomendasi	15.000.000	20 rekomendasi	20.000.000	20 rekomendasi	25.000.000	20 rekomendasi	30.000.000	20 rekomendasi	35.000.000	20 rekomendasi	125.000.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 3				Pemasaran pariwisata																	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 3	2.0 1			Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.																	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 3	2.0 1	01		Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah promosi dan pemasaran yg dilaksanakan akan	51 kali	51 kali	60.000.000	51 kali	60.000.000	51 kali	61.000.000	51 kali	62.000.000	51 kali	63.000.000	51 kali	64.000.000	51 kali	310.000.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	0 3	2.0 1	02		Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Jumlah event pariwisata yg dilaksanakan dan yg didukung	2 kali	2 kali	30.000.000	2 kali	30.000.000	2 kali	35.000.000	2 kali	36.000.000	2 kali	37.000.000	2 kali	38.000.000	2 kali		Dispar	Kab.bengkulu selatan

*Rencana Strategis
Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan
2021-2026*

		3.26	03	2.01	04		Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan bidang pariwisata	2 lembaga	2 lembaga	20.000.000	2 lembaga	20.000.000	2 lembaga	25.000.000	2 lembaga	30.000.000	2 lembaga	35.000.000	2 lembaga	40.000.000	2 lembaga	150.000.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan
		3.26	03	2.01	05		Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah hotel dan restoran yg termonitoring	51 kali	51 kali	25.000.000	51 kali	25.000.000	51 kali	30.000.000	51 kali	35.000.000	51 kali	40.000.000	51 kali	45.000.000	51 kali	175.000.000	Dispar	Kab.bengkulu selatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, Proses, Keluaran, Hasil, Manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (Lima Tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan serta peraturan daerah.... Tahun.... Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tercantum di bawah ini :

Table T-C.28
INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
			Target	Target	Target	Target	Target	
1	Jumlah pegawai yang memakai pakaian dinas	20 Orang	20	25	25	25	25	5
2	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	25 orang	25	25	25	25	25	5
3	Jumlah surat masuk dan keluar	12 bulan	12	12	12	12	12	5
4	Jumlah komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12	12	12	12	12	5
5	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam keadaan baik	30pcs	30	30	30	30	30	5
6	Jumlah barang penunjang kegiatan kantor	20 jenis	20	20	20	20	20	5
7	Jumlah komponen peralatan rumah tangga	650 unit	650	650	650	650	650	5
8	Jumlah komponen bahan logistik kantor	750 rim	750	750	750	750	750	5
9	Jumlah komponen barang cetak dan penggandaan	13.000 lembar	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	5
10	Jumlah kue kotak, nasi kotak, dan air mineral	1.750 kotak/botol	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	5
11	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di OPD	1.000 Exemplar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5
12	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	100 kali	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5
13	Jumlah kendaraan dinas operasional	7 unit	7	7	7	7	7	5
14	Jumlah mebeleur OPD yang dalam keadaan baik	2 unit	2	2	2	2	2	4

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
			Target	Target	Target	Target	Target	
15	Jumlah peralatan dan mesin penunjang kegiatan OPD yang terawat	7 kali	7	7	7	7	7	5
16	Jumlah gedung/bangunan yang di rehabilitasi.	2 unit	2	2	2	2	2	5
17	Jumlah kendaraan dinas operasional	1 unit roda 4	1	1	1	1	1	5
18	Jumlah dokumen perencanaan	9 dokumen	9	9	9	9	9	5
19	Jumlah dokumen dan laporan capaian kinerja laporan triwulan	2 dokumen	2	2	2	2	2	5
20	Jumlah dokumen	3 dokumen	3	3	3	3	3	4
21	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	24 ASN	24	24	24	24	24	5
22	Jumlah laporan administrasi keuangan	12 bulan	12	12	12	12	12	5
23	Jumlah dokumen keuangan	1 dokumen	1	1	1	1	1	5
24	Jumlah barang milik daerah	2 laporan	2	2	2	2	2	5
25	Jumlah kawasan strategis pariwisata	4 kawasan	4	4	4	4	4	5
26	Jumlah sarana dan prasarana objek wisata	2 bangunan	2	2	2	2	2	5
27	Jumlah pengelolaan kawasan strategis pariwisata	5 kali	5	5	5	5	5	5
28	Jumlah industri yang berstandarisasi industri pariwisata	70 pelaku	70	70	70	70	70	5
29	Jumlah SDM POKDARWIS yang terlatih	4 kelompok	4	4	4	4	4	5

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
			Target	Target	Target	Target	Target	
30	Jumlah dan berkembangnya investor di Bengkulu Selatan	10 investor	10	10	10	10	10	5
30	Jumlah usaha pariwisata yang membuat rekomendasi	5 usaha	5	5	5	5	5	5
31	Jumlah usaha yang dibina	6 binaan	6	6	6	6	6	5
32	Jumlah promosi dan pemasaran yang dilaksanakan	51 kali	51	51	51	51	51	5
33	Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan dan yang didukung	2 kali	2	2	2	2	2	5
34	Kerjasama dan kemitraan bidang pariwisata	5 lembaga	5	5	5	5	5	5
35	Jumlah hotel dan restoran yang termonitoring	7 kali	7	7	7	7	7	5

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pariwisata dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pariwisata ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pariwisata. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pariwisata merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pariwisata dan atau target kinerja sasaran Dinas Pariwisata.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pariwisata yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pariwisata harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJIP) Dinas Pariwisata. Laporan Kinerja (LKJIP) Dinas Pariwisata ini akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Pariwisata.

Semoga Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan adalah keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Selatan

Drs. YULIAN FAUZI, MAP.
NIP. 19620706 198201 1 003